

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011, Hal. 15. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undan Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm 30.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 20.
- Andi Hamzah, 2015, *Pemberasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Rt Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 4.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm 343-344
- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hlm 81-82
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang Hal.1
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta Hal. 13.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta : 2008 , Hlm 54
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 63
- Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 8. Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), Hlm 96.
- Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, Hlm 6-12
- Mulyati Pawennei Dan Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, Hlm. 6
- Mispansyah Dan Amir Ilyas, 2016, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 53
- Pasal 1 Ayat (3) Undang –Undang Dasar 1945
- Pasal 43 *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi*.
- Pasal 3 *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Putusan Nomor 29/Pid.Sus –Tpk/2018/ Pt.Dki. Hlm. 3 Dari 223.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Hlm.106-109.
- P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 8.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 29
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Iii, Jakarta : Ui-Pers , 1986, Hal. 3.

- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Hal. 23.
- Teguh Prasetyo, 2010 *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 47.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2014. Hlm. 39.

#### **UNDANG –UNDANG**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharan Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perbankan Sebagaiman Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

#### **LAMPIRAN**

- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.